

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Kurikulum

Pengelolaan pembelajaran dan masalah belajar merupakan hal sentral dalam kegiatan pendidikan di madrasah. Kegiatan pengelolaan kurikulum merupakan bagian penting karena pekerjaan utama madrasah adalah mengelola pembelajaran sehingga siswa dapat mencapai potensi terbaik. Berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran tersebut telah terjadi perubahan kebijakan dalam pengelolaan kurikulum di Indonesia. Kurikulum yang selama ini diatur terpusat kini diserahkan pada satuan pendidikan. Sebagaimana diatur dalam PP No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dengan demikian, madrasah sebagai satuan pendidikan diberi kesempatan untuk melakukan pengaturan sendiri kurikulumnya berdasarkan hal-hal pokok yang diatur pemerintah.

Kurikulum memiliki kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Dengan kata lain kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu pembentukan manusia sesuai dengan falsafah hidup bangsa. Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan memberikan pegangan dan pedoman tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan.¹

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, salah satunya adalah dengan melakukan perubahan kurikulum, seperti yang terjadi sejak tahun pelajaran 2001/2002 diperkenalkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang merupakan pengembangan dari kurikulum 1994, kemudian dikenalkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang merupakan pengembangan dari kurikulum berbasis kompetensi. Dan kini dikembangkan lagi menjadi kurikulum 2013. Namun implementasinya

¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2011, hlm. 4

masih dilakukan secara bertahap. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor : 0912 Tahun Tahun 2013 memutuskan bahwa Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah mencakup kerangka dasar dan struktur kurikulum, standar isi, standar proses dan standar penilaian. Berikut ini akan dijelaskan konsep Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan konsep Kurikulum 2013 (K13).

1. Konsep Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam mengemban identitas budaya dan bangsanya. Kurikulum ini dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar yang membangun integritas sosial serta membudayakan dan mewujudkan karakter nasional.

KTSP merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan agar dapat mengakomodasi dan memodifikasikan keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat, industri, dan pemerintah dalam membentuk pribadi peserta didik.²

Hal tersebut dilakukan agar sekolah dapat secara leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat juga dituntut agar lebih memahami, membantu, dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Untuk mengenal Kurikulum Tingkat satuan pendidikan (KTSP), lebih jauh diuraikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pengertian KTSP

Istilah kurikulum secara umum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dengan dewasa

² Mohammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2008, hlm 12

ini. Tafsiran-tafsiran tersebut berbeda-beda satu dengan lainnya sesuai dengan titik berat inti dan pandangan serta orientasi dari pakar yang bersangkutan. Di antaranya disebutkan bahwa titik inti atau orientasi kurikulum adalah memuat isi dan materi pelajaran, kurikulum sebagai rencana pembelajaran dan kurikulum sebagai pengalaman belajar.³

Dari pernyataan Joko Susilo tersebut menunjukkan bahwa, kegiatan-kegiatan kurikulum tidak terbatas dalam ruang kelas saja, melainkan mencakup juga kegiatan-kegiatan di luar kelas. Tidak ada pemisahan yang tegas antara intra dan ekstrakurikulum. Semua kegiatan yang di dalamnya ada materi pembelajaran, rencana pembelajaran, dan pengalaman belajar bagi siswa pada hakekatnya adalah kurikulum. Demikian pula halnya pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

KTSP merupakan suatu konsep pemberian wewenang atau otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat agar dapat termodifikasi dan terakomodasi dengan baik sehingga tercipta pendidikan yang kondusif dan partisipatif. Dengan kata lain KTSP merupakan bentuk operasional desentralisasi pendidikan.⁴

Dari uraian di atas pengertian kurikulum dapat dijelaskan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (19) tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Sedangkan KTSP selain berisikan rencana juga sekaligus mengandung pengaturan bagi pelaksana kurikulum yang memberikan rambu-rambu dalam implementasi dan operasionalnya, yang disusun di tingkat satuan pendidikan. Dengan demikian maka dapat didefinisikan bahwa Kurikulum

³ Mohammad Joko Susilo, *ibid.* hlm. 77

⁴ Mohammad Joko Susilo, *ibid.*, hlm. 12 - 13

Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan dan silabus.⁵

Pengertian kurikulum menurut UU RI No. 20 tahun 2003 di atas menjelaskan kurikulum secara umum. Sedangkan pengertian KTSP mempunyai perbedaan pada kewenangan oleh masing-masing satuan pendidikan untuk menyusunnya. KTSP memberi kewenangan yang luas bagi satuan pendidikan untuk menyusun kurikulumnya sendiri sesuai dengan kebutuhannya, sehingga kurikulum antara satuan pendidikan yang satu dengan lainnya tidak boleh berbeda.

b. Dasar Pelaksanaan KTSP

Desentralisasi pendidikan digulirkan sejalan dengan kebijakan makro pemerintah, yakni otonomi daerah sehingga pusat-pusat kekuasaan dilimpahkan kewenangannya kepada daerah. Bahkan dalam pendidikan, kewenangan ini masuk sampai pada satuan pendidikan dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Sehingga dalam era desentralisasi pendidikan ini, akan terjadi berbagai variasi dan jenis kurikulum pada setiap satuan pendidikan. Meskipun demikian, perbedaan ini tetap berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP), sehingga kemasan kurikulum yang berbeda-beda ini pada akhirnya akan bermuara pada visi, misi dan tujuan yang sama yang diikat oleh SNP.⁶

Pada tingkat implementasi KTSP, satuan pendidikan harus berpedoman atau berdasar pada regulasi peraturan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Pasal 1 Ayat 1 . Disebutkan bahwa, satuan pendidikan

⁵ Harsiati T dan Thamrin M., *Modul pengembangan KTSP di Madrasah Menuju Akreditasi Bermakna*, Australia's Education Partnership with Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 3

⁶ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah* PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 24.

dasar dan menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan pada :

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 sampai dengan pasal 38
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 5 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 27
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pelaksanaan undang-undang dan peraturan di atas secara teknis diperjelas secara rinci melalui peraturan-peraturan setingkat di bawahnya yang harus dipedomani oleh satuan pendidikan antara lain sebagai berikut. :

- 1) Permendiknas RI No. 24 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana;
- 2) Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
- 3) Panduan penyusunan KTSP BSNP tahun 2006
- 4) PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5) Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
- 6) Permenag No. 2 Tahun 2008 tentang Standar Isi Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab.
- 7) SK Dirjend Pendis No. Dj. II.I/PP.00/ED/681/2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi.

- 8) Surat Edaran Kanwil Kw.11.4/2/PP.00/6897/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Kaldik pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng
- 9) SK Gubernur Jateng N0. 432.5/5/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Kurikulum Mulok Mapel Bahasa Jawa untuk SD, MI, SMP, MTs, SMA, dan MA

Berdasarkan isi yang tertuang dalam Permendiknas RI No. 24 Tahun 2006 Pasal 1 dan 2 di atas, serta peraturan-peraturan pendukung lainnya, mulai tahun ajaran 2006/2007 semua tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah harus mengembangkan dan menerapkan kurikulum berbasis standar isi dan standar kompetensi yang telah ditetapkan pemerintah.

c. Fungsi dan Tujuan KTSP

Dalam aktivitas belajar mengajar, kedudukan kurikulum sangat krusial, karena dengan kurikulum anak didik akan memperoleh manfaat. Di samping kurikulum bermanfaat bagi anak didik, ia juga mempunyai fungsi-fungsi lain. Fungsi yang dimaksud di sini adalah fungsi kurikulum secara umum yang mencakup di dalamnya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi Kurikulum dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pendidikan.

Menurut Abdullah Idi, ada empat tujuan pendidikan utama yang secara hierarkis dapat dikemukakan, yaitu tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan intruksional. Artinya, untuk mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan, tujuan-tujuan tersebut harus dicapai secara bertingkat dan saling mendukung satu sama lain, adanya kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang dimaksud.⁷

⁷ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, Ar Ruzz Media, Jogjakarta, 2011, hlm. 228

Dengan demikian, kurikulum pada satuan pendidikan merupakan suatu alat atau usaha mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan oleh satuan pendidikan tertentu yang dianggap cukup tepat dan krusial untuk dicapai.

2) Fungsi Kurikulum bagi Anak Didik

Fungsi kurikulum bagi anak didik dimaksudkan bahwa, kurikulum sebagai organisasi belajar tersusun disiapkan untuk anak didik sebagai salah satu konsumsi bagi pendidikan mereka. Dengan demikian anak didik akan mendapatkan sejumlah pengalaman baru yang kelak di kemudian hari dapat dikembangkan seiring dengan perkembangan anak didik.⁸

Kalau dikaitkan dengan pendidikan Islam, pendidikan harus diorientasikan kepada kepentingan peserta didik, dan perlu diberi bekal pengetahuan untuk hidup pada zamannya kelak. Dalam hadis Nabi SAW. disebutkan : "Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang lain dari zamanmu". Dengan demikian maka kurikulum diharapkan mampu menawarkan program-program pada anak didik yang akan hidup pada zamannya, dengan latar belakang sosio historis dan kultural yang berbeda dengan zaman di mana kedua orang tuanya berada.

3) Fungsi Kurikulum bagi Pendidik

Fungsi kurikulum bagi pendidik sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar para anak didik dan pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak didik dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan.⁹

Pendidik sebagai instrumen utama sebagai pelaksana kurikulum ini membutuhkan pedoman khusus berupa kurikulum

⁸ Mohammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 84

⁹ Abdullah Idi, *op.cit*, hlm. 229

yang ditetapkan pemerintah guna sebagai alat tercapainya tujuan pendidikan yang bermutu.

4) Fungsi Kurikulum bagi Kepala madrasah

Kepala madrasah merupakan administrator dan sekaligus sebagai supervisor yang mempunyai tanggung jawab terhadap kurikulum.

Fungsi kurikulum bagi kepala madrasah adalah sebagai berikut :

- a) Kurikulum sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi yaitu memperbaiki situasi belajar
- b) Kurikulum sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam menciptakan situasi untuk menunjang situasi belajar anak ke arah yang lebih baik.
- c) Kurikulum sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam memberikan bantuan kepada guru untuk memperbaiki situasi mengajar.
- d) Kurikulum sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum lebih lanjut
- e) Kurikulum sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi kemajuan belajar mengajar.¹⁰

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah mempunyai dua tanggung jawab terhadap kurikulum, yaitu sebagai administrator dan supervisor. Kepala sekolah sebagai administrator harus mampu menguasai tugas-tugasnya dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk itu kepala sekolah harus kreatif mampu memiliki ide-ide dan inisiatif yang menunjang perkembangan sekolah. Kepala sekolah sebagai supervisor harus diwujudkan dalam kemampuan penyusun dan melaksanakan program supervisi pendidikan serta memanfaatkan hasilnya.

5) Fungsi Kurikulum bagi Orangtua

Fungsi kurikulum bagi orangtua adalah sebagai bentuk adanya partisipasi orangtua dalam membantu usaha madrasah dalam memajukan putra-putrinya. Bantuan

¹⁰ Mohammad Joko Susilo, *op.cit*, hlm. 84

tersebut dapat berupa konsultasi langsung dengan madrasah mengenai masalah-masalah yang menyangkut anak-anak mereka. Bantuan berupa pemikiran, dukungan moril maupun materiil bisa dilakukan melalui mekanisme yang ada seperti konsultasi langsung atau melalui komite.¹¹

Jadi dalam implementasinya di madrasah, orang tua siswa harus dilibatkan secara aktif serta sekolah diharapkan dapat berkomunikasi dengan baik melalui rapat ataupun memberikan informasi lewat surat kepada orang tua siswa.

6) Fungsi Kurikulum bagi Masyarakat

Menurut Mohammad Joko Susilo, fungsi kurikulum bagi masyarakat yaitu agar masyarakat sebagai pemakai lulusan ikut memberikan bantuan guna memperlancar pelaksanaan program pendidikan yang membutuhkan kerja sama dengan pihak masyarakat. Dan juga ikut memberikan kritik atau saran yang membangun dalam rangka menyempurnakan program pendidikan di satuan pendidikan, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan lapangan kerja.¹²

Dengan demikian, melalui kurikulum sekolah yang bersangkutan, masyarakat bisa mengetahui apakah pengetahuan, sikap, dan nilai serta keterampilan yang dibutuhkannya relevan atau tidak dengan kurikulum suatu sekolah

Di samping memiliki fungsi sebagaimana tersebut di atas, kurikulum secara umum juga memiliki tujuan.

Tujuan kurikulum pada dasarnya adalah suatu panduan menuju arah yang diinginkan oleh para penyusunnya untuk bisa dicapai oleh anak didik ketika menggunakan kurikulum tersebut. Tujuan merupakan suatu garis besar pernyataan akan harapan masyarakat dan keinginan untuk pembelajaran anak didik. Oleh karenanya, tujuan umum kurikulum menjelaskan profil anak

¹¹ Abdullah Idi., *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, Ar Ruzz Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 231

¹² Mohammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 85

didik yang dicapai setelah mengikuti program pendidikan di madrasah pada jenjang waktu tertentu.¹³

Tujuan kurikulum mencakup tujuan pendidikan dasar dan menengah yang mengacu pada tujuan umum pendidikan yang dirumuskan dalam standar nasional pendidikan yaitu:

- 1) Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- 2) Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- 3) Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.¹⁴

Berdasarkan rumusan tujuan kurikulum tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap satuan pendidikan dapat mengembangkan rumusan yang lebih spesifik yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

d. Komponen-komponen KTSP

Kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang disebut sebagai komponen kurikulum. Komponen itu merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan.

Ralph W. Tyler dalam bukunya *Basic Principle of Curriculum and Intruction* yang dikutip Prof. Dr. S. Nasution, M.A., mengajukan empat pertanyaan pokok yang mendasari ditemukannya komponen kurikulum, yakni:

- 1) Tujuan apa yang harus dicapai sekolah ?
- 2) Bagaimanakah memilih bahan pelajaran guna mencapai tujuan itu ?
- 3) Bagaimana bahan disajikan agar efektif diajarkan?

¹³ Harsiati T dan Thamrin M, *Modul pengembangan KTSP di Madrasah Menuju Akreditasi Bermakna*, Australia's Education Partnership with Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 41-42

¹⁴ Abdullah Idi., *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, Ar Ruzz Media Yogyakarta, 2011, hlm. 335

4) Bagaimana efektivitas belajar dapat dinilai? ¹⁵

Berdasarkan pertanyaan itu, maka diperoleh keempat komponen kurikulum yaitu: 1) Tujuan, 2) Bahan Pelajaran, 3) Proses belajar mengajar, dan 4) Evaluasi dan penilaian.

Beberapa komponen di atas, memiliki maksud yang sama dengan komponen KTSP. Hanya saja komponen KTSP telah mengalami pengembangan yang sangat rinci, sebagaimana Panduan Penyusunan KTSP yang disusun oleh BNSP, bahwa KTSP memiliki empat komponen, yaitu :

1) Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum dan khusus sebagai berikut.

- a) Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- b) Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- c) Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa KTSP memiliki dua tujuan yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan umum KTSP adalah menciptakan kemandirian guru melalui pergantian sistem penyusunan kurikulum dari sentralistik menjadi desentralistik. Tujuan KTSP

¹⁵ Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 88

¹⁶ Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006. *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Tersedia: www.bsnp-indonesia.org (30 September 2016)

secara khusus yaitu meningkatkan mutu pendidikan pengembangan kurikulum secara bersama-sama, dan meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan, Kedua tujuan KTSP tersebut, baik tujuan umum dan tujuan khusus tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional.

2) Struktur dan Muatan KTSP

Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam Standar Isi meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut.

- a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
- b) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
- c) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
- d) Kelompok mata pelajaran estetika
- e) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.¹⁷

Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP 19/2005 Pasal 7. Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum. Berikut ini adalah tujuh muatan KTSP yang terdapat pada dokumen 1 KTSP.

- a) Mata pelajaran
- b) Muatan lokal
- c) Pengembangan diri
- d) Beban belajar
- e) Kenaikan kelas
- f) Pendidikan Kecakapan Hidup
- g) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global

¹⁷ Badan Standar Nasional Pendidikan, *ibid*, 2006.

3) Kalender Pendidikan

Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam Standar Isi.¹⁸

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dilaksanakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

4) Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran, atau disingkat RPP, adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada hari tersebut.¹⁹

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang telah dibuat tim pengembang kurikulum dari pusat. Sedangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas yang telah

¹⁸ Badan Standar Nasional Pendidikan, *ibid*, 2006

¹⁹ Badan Standar Nasional Pendidikan, *ibid*, 2006

dibuat guru mata pelajaran sebagai pedoman agar dalam mengajar sesuai dengan Standar Kompetensi dan dan Kompetensi Dasar,

e. Karakteristik KTSP

Sebagai sebuah konsep dan program, KTSP memiliki karakteristik. Karakteristik KTSP adalah sebagai berikut :

- 1) KTSP menekankan pada ketercapaian kompetensi anak didik baik secara individu maupun klasikal. Dalam KTSP anak didik dibentuk untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat yang pada akhirnya akan membentuk pribadi yang terampil dan mandiri.
- 2) KTSP berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman.
- 3) Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
- 4) Sumber belajar tidak hanya guru, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif
- 5) Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.²⁰

Dari pernyataan Abdullah Idi tersebut mengenai karakteristik KTSP dapat disimpulkan bahwa kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi satuan pendidikan sehingga satuan pendidikan dapat mempunyai ciri khas dan karakter yang membedakan dengan satuan pendidikan satu dengan yang lain.

2. Konsep Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 telah diberlakukan melalui Permenag nomor 00912 Tahun 2013 secara nasional di pendidikan Madrasah pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Bahasa Arab. Konsep Kurikulum 2013 setidaknya meliputi hakikat, tujuan yang hendak dicapai, dan desain dari kurikulum yang dimaksud. Berikut ini penjabaran dari hakikat, tujuan, desain (kurikulum terintegrasi) pada kurikulum 2013.

²⁰ Abdullah Idi., *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, Ar Ruzz Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 333

a. Hakikat Kurikulum 2013

Ketika kita memasuki dunia pendidikan, kita pasti tidak asing lagi mendengar istilah pendidikan karakter. Pendidikan karakter terdiri dari dua term, yaitu pendidikan dan karakter.

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh individu atau kelompok (instansi) untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya (hati, pikir, rasa dan karsa, serta raga) untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²¹ Karakter adalah tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti seseorang yang membedakan antara orang satu dengan yang lain.”²²

Jadi pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter pada anak didik yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk merealisasikan nilai-nilai karakter.

Kurikulum 2013 ini muncul sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya dan untuk menjawab akan pendidikan karakter. Kurikulum ini didesain dengan mengintegrasikan karakter dalam proses pengimplementasiannya. Pada semua komponen kurikulum harus mencerminkan karakter yang hendak dicapai. Demikian juga pada proses pembelajarannya. Oleh karena itu, pada kurikulum 2013 muncul Kompetensi Inti (KI) sebagai acuan dalam proses pembelajaran

b. Pengembangan Tujuan Kurikulum

Pengembangan berarti kegiatan yang menghasilkan atau menyusun suatu yang baru (*contrustion*), pengembangan sesuatu yang telah ada (*improvement*). Pengembangan kurikulum adalah kegiatan menghasilkan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan atau proses mengaitkan satu komponen dengan lainnya untuk menghasilkan kurikulum. Pengembangan kurikulum juga bisa

²¹ Muchlas Samani dan Hariyanto MS, *Pendidikan Karakter*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2012, hlm 37

²² Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2012, hlm 11

diartikan sebagai kegiatan penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum.

Dilihat dari hirarkisnya tujuan pendidikan terdiri atas tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur.

1) Tujuan Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²³

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah tujuan umum yang sarat dengan muatan filosofis. Tujuan pendidikan nasional bersumber dari Pancasila yang dirumuskan dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 yang merumuskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggungjawab.

2) Tujuan Instiusional

Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Setiap siswa harus mempunyai kualifikasi setelah menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan. Tujuan institusional berguna agar setiap siswa mencapai standar kompetensi lulusan dalam suatu lembaga pendidikan.²⁴

²³ Wikipedia, 2016. *Tujuan Pendidikan*. Tersedia: www.wikipedia.com (10 Oktober 2016)

²⁴ Loeloeck Indah Purwati dan Sofan Amri,, hlm 45

Tujuan institusional ini merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu, setiap sekolah atau lembaga pendidikan memiliki tujuan institusionalnya sendiri – sendiri. Tidak seperti tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional lebih bersifat kongkrit. Tujuan institusional ini dapat dilihat dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan.

3) Tujuan Kurikuler

Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi. Setiap tujuan kurikuler harus mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional.²⁵

Dengan demikian, tujuan kurikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional sehingga kumulasi dari setiap tujuan kurikuler ini akan menggambarkan tujuan institusional. Artinya, semua tujuan kurikuler yang ada pada suatu lembaga pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional yang bersangkutan.

c. Kurikulum Terintegrasi

Konsep keintegrasian pada hakikatnya menunjukkan pada keseluruhan, kesatuan, kebulatan, kelengkapan, kompleksitas yang ditandai dengan interaksi antar komponen-komponennya. Pendekatan keintegrasian ini merupakan suatu sistem totalitas yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi, baik antara komponen satu dengan komponen lainnya maupun komponen dengan keseluruhan, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

²⁵ Loeloek Indah Purwati dan Sofan Amri, *ibid*, hlm 45

Kurikulum terintegrasi didefinisikan oleh Loeloek dan Sofan sebagai berikut :

Kurikulum terintegrasi merupakan sebuah sistem dan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu atau mata pelajaran (bidang studi) untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas bagi anak didik. Arti bermakna yaitu anak didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari secara utuh dan realistis. Sedangkan arti luas yaitu ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh anak didik tidak dibatasi oleh lingkup disiplin tertentu saja, tetapi melingkupi semua lintas disiplin yang dipandang berkaitan satu sama lain.²⁶

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa akibat adanya pengintegrasian mata pelajaran maka melahirkan kompetensi inti (KI). Kompetensi inti merupakan pengikat kompetensi-kompetensi yang harus dihasilkan melalui pembelajaran dalam setiap mata pelajaran. Kompetensi inti bebas dari mata pelajaran karena tidak mewakili mata pelajaran.

Kompetensi inti adalah pasokan kompetensi dasar yang harus dipahami dan dimiliki oleh anak didik melalui proses pembelajaran yang tepat sehingga menjadi kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan operasionalisasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh anak didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, yang menggambarkan kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dipelajari oleh anak didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran.²⁷

Dengan demikian, Kompetensi Inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas. Kompetensi inti bukan untuk diajarkan, melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran mata pelajaran yang relevan. Setiap mata pelajaran harus tunduk pada kompetensi inti yang telah dirumuskan. Dengan kata lain,

²⁶ Loeloek Indah Purwati dan Sofan Amri, *ibid*, hlm 29

²⁷ E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm 174.

semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari pada kelas tersebut harus berkontribusi terhadap pembentukan kompetensi inti. Ibaratnya, kompetensi inti merupakan pengikat kompetensi-kompetensi yang harus dihasilkan dengan mempelajari setiap mata pelajaran.

d. Kurikulum integrasi sainstek dan imtak

Istilah sainstek merupakan perpaduan antara sains (ilmu pengetahuan) dan teknologi. Sains dan teknologi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena sains merupakan sumber teknologi, sedangkan teknologi merupakan aplikasi sains. Sains diartikan himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar. Dan teknologi diartikan sebagai himpunan pengetahuan terapan manusia tentang proses pemanfaatan alam yang diperoleh dari penerapan sains, dalam kegiatan yang produktif ekonomis.

Istilah Imtak merupakan perpaduan antara iman dan takwa, yaitu gambaran karakteristik nilai-nilai keagamaan (keislaman) yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Imtak merupakan urusan yang sarat akan nilai, kepercayaan, pemahaman, sikap, perasaan dan perilaku yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadith.²⁸

Dari penjabaran di atas tentang sainstek dan imtak, menurut Islam tidak ada pemisahan (dikotomi) antar keduanya, karena keduanya berasal dari sumber yang tunggal, yaitu Allah SWT. Pengetahuan dalam bentuk imtak adalah pengetahuan yang bersumber langsung dari Allah SWT dalam bentuk wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pengetahuan dalam bentuk sainstek, pada dasarnya juga berasal dari Allah SWT, yang di dapat manusia dari alam, akal manusia yang diciptakan oleh Allah SWT.

e. Struktur Kurikulum

Kurikulum 2013 diberlakukan tidak bagi semua madrasah di Indonesia tetapi hanya untuk madrasah-madrasah yang telah

²⁸ Loeloek Indah Purwati dan Sofan Amri, *op.cit*, hlm 30

ditetapkan saja. Selebihnya, menggunakan kurikulum kombinasi yang merupakan perpaduan antara KTSP dan K13. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah yang mengaturnya.

Dalam KMA ini ditetapkan kurikulum kombinasi yaitu mata pelajaran umum tetap menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 (KTSP) sedangkan untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab menggunakan Kurikulum 2013. Sehingga struktur kurikulum pada Madrasah Tsanawiyah berdasarkan KMA No. 207 Tahun 2014.

B. Pengembangan Kurikulum

Kegiatan pengembangan kurikulum merupakan hal penting karena pekerjaan utama madrasah adalah mengelola pembelajaran sehingga anak didik dapat mencapai potensi terbaik. Berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran tersebut, telah terjadi perubahan kebijakan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Berdasarkan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pengembangan kurikulum diserahkan pada tingkat satuan pendidikan.²⁹

Pemahaman yang tepat tentang pengembangan kurikulum sangat diperlukan. Dengan demikian maka perlu dipahami beberapa hal yang menyangkut tentang hakikat, prinsip, pendekatan, pengembang kurikulum dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum.

1. Hakikat Pengembangan Kurikulum

Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *currir* yang berarti berlari dan *curere* yang berarti tempat berpacu. Dengan demikian, istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga pada zaman Romawi Kuno di Yunani, yang mengandung pengertian jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis *start* sampai *finish*. Selanjutnya, istilah kurikulum ini digunakan dalam dunia pendidikan dan mengalami perubahan makna sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang ada pada dunia pendidikan. Kemudian secara garis besar, kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat materi pendidikan dan pengajaran yang diberikan

²⁹ Titik Harsiati Moch Thamrin, *Modul pengembangan KTSP di Madrasah Menuju Akreditasi Bermakna*, Australia's Education Partnership with Indonesia Jakarta, 2012, hlm. v-vi

kepada anak didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai.³⁰

Uraian di atas lebih menitik beratkan pada hakekat kurikulum secara umum. Sedangkan hakekat pengembangan kurikulum dapat dijelaskan bahwa pengembangan kurikulum adalah sebuah siklus untuk meningkatkan kualitas bidang pembelajaran. Dengan demikian pengembangan KTSP merupakan inti dari keseluruhan kegiatan di satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses untuk membuat keputusan tentang tujuan pendidikan yang akan dicapai, bagaimana tujuan direalisikannya melalui proses pembelajaran.

2. Prinsip Pengembangan Kurikulum

Ada beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum sebagaimana diungkapkan oleh para ahli dalam buku-buku mereka. Di antaranya menurut Nana Syaodih Sukmadinata mengungkapkan bahwa prinsip pengembangan kurikulum ada lima yaitu: 1) prinsip relevansi, 2) prinsip fleksibilitas, 3) prinsip kontinuitas, 4) prinsip praktis, dan 5) prinsip efektifitas.

Diungkapkan pula oleh Oemar Hamalik sebagaimana dikutip oleh Muhammad Joko Susilo, bahwa prinsip pengembangan kurikulum terbagi atas delapan macam yaitu: 1) prinsip berorientasi pada tujuan 2) prinsip relevansi 3) prinsip efisiensi dan efektivitas 4) prinsip fleksibilitas 5) prinsip kontinuitas 6) prinsip keseimbangan 7) prinsip keterpaduan 8) prinsip mutu.

Beberapa prinsip di atas merupakan prinsip pengembangan kurikulum secara umum. Sedangkan prinsip pengembangan KTSP lebih spesifik dan rinci meskipun pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Adapun prinsip pengembangan KTSP adalah sebagai berikut :

- a. Berpusat pada Potensi, Perkembangan, Kebutuhan, dan Kepentingan Peserta Didik dan Lingkungannya.

³⁰ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, Ar Ruzz Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 206

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya. Oleh karenanya pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.

b. Beragam dan Terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender.

c. Tanggap Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni.

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis. Kurikulum memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

d. Relevan dengan Kebutuhan Kehidupan (Dunia Kerja dan Masa Depan)

Kurikulum harus memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan kebutuhan dunia kerja.

e. Menyeluruh dan Berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.

f. Belajar Sepanjang Hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

g. Seimbang Antara Kepentingan Nasional dan Kepentingan Daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan semangat Bhineka Tunggal Ika dan

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³¹

Pemenuhan prinsip-prinsip di atas itulah yang membedakan antara penerapan satu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan kurikulum sebelumnya. Karena prinsip-prinsip itu merupakan ruh atau jiwanya kurikulum. Dalam mensikapi suatu pengembangan kurikulum, bukan hanya pada pemenuhan struktur kurikulum sebagai jasad dari kurikulum. Tetapi yang jauh lebih penting adalah perubahan kultural (perilaku) guna memenuhi prinsip-prinsip khusus yang terkandung dalam pengembangan kurikulum.

3. Pendekatan Pengembangan Kurikulum

Para pengembang telah menemukan beberapa pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Yang dimaksudkan dengan pendekatan adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik.

Berikut ini adalah pendekatan-pendekatan yang dikembangkan oleh para pengembang.

- a. Pendekatan Bidang Studi/Pendekatan Subjek/Disiplin Ilmu
Pendekatan ini menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum. Pengembangan dimulai dengan mengidentifikasi secara teliti pokok-pokok bahasan yang akan dibahas, kemudian pokok-pokok bahasan tersebut diperinci menjadi bahan-bahan pelajaran yang harus dikuasai, dan akhirnya mengidentifikasi dan mengurutkan pengalaman belajar dan keterampilan-keterampilan yang harus dilakukan oleh anak didik.³²
- b. Pendekatan Berorientasi pada Tujuan
Pendekatan yang berorientasi tujuan ini menempatkan rumusan atau menempatkan tujuan yang hendak dicapai dalam posisi sentral. Pendekatan ini memiliki kelebihan: 1) tujuan yang ingin dicapai jelas bagi penyusun kurikulum; 2) tujuan yang jelas akan memberikan arah yang jelas pula di dalam

³¹ Harsiati T. dan Thamrin M., *Modul pengembangan KTSP di Madrasah Menuju Akreditasi Bermakna*, Australia's Education Partnership with Indonesia Jakarta, 2012, hlm. 20-24

³² Abdullah Idi, *Ibid*, hlm 222-223

menetapkan materi pelajaran, metode, jenis kegiatan, dan alat untuk mencapai tujuan; 3) tujuan yang jelas akan memudahkan mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai; 4) tujuan dan penilaian yang jelas akan membantu memudahkan upaya-upaya perbaikan.³³

c. Pendekatan Rekonstruksionalisme

Pendekatan ini disebut juga rekonstruksi sosial karena memfokuskan kurikulum pada masalah penting yang dihadapi masyarakat, seperti dekadensi moral, ledakan penduduk, malapetaka akibat teknologi dan lain-lain. Pendekatan ini menggunakan pendidikan untuk merombak tata sosial dan lembaga sosial yang ada dan membangun struktur sosial baru.³⁴

d. Pendekatan Humanistik

Kurikulum ini berpusat pada siswa (*student centered*) dan mengutamakan perkembangan afektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Para pendidik humanistik yakin bahwa kesejahteraan mental dan emosional siswa harus dipandang sentral dalam kurikulum, agar belajar itu memberi hasil maksimal. Prioritasnya adalah pengalaman belajar yang diarahkan pada tanggapan minat, kebutuhan, dan kemampuan siswa.³⁵

e. Pendekatan Akuntabilitas

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban lembaga pendidikan tentang pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat menjadi hal yang penting dalam dunia pendidikan. Akuntabilitas yang sistematis pertama kali diperkenalkan Frederick Tylor dalam bidang industri pada permulaan abad ini. Pendekatannya yang dikenal sebagai manajemen ilmiah (*scientific management*), menetapkan tugas-tugas spesifik yang harus diselesaikan pekerja dalam waktu tertentu. Tiap pekerja bertanggung jawab atas penyelesaian tugas itu.³⁶

Beberapa pendekatan pengembangan kurikulum di atas merupakan titik tolak atau sudut pandang tentang proses pengembangan kurikulum. Beberapa pendekatan ini cocok diterapkan di Indonesia karena menganut sistem pendidikan yang desentralisasi, artinya kebijakan pendidikan tidak

³³ Soebandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 56

³⁴ Nasution, S. *Pengembangan Kurikulum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 48

³⁵ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, Ar Ruzz Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 225

³⁶ Nasution, S. *op-cit*, hlm. 50

ditentukan oleh pusat, tetapi ditentukan oleh daerah bahkan oleh satuan pendidikan. Karena itu, untuk memperoleh kualitas lulusan sekolah, dapat terjadi persaingan antar sekolah atau antar daerah

4. Pengembang Kurikulum

Dalam mengembangkan suatu kurikulum, banyak pihak yang turut berpartisipasi, yaitu administrator pendidikan, ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli bidang ilmu pengetahuan, guru-guru dan orang tua murid serta tokoh-tokoh masyarakat. Dari pihak-pihak tersebut yang secara terus menerus turut terlibat dalam pengembangan kurikulum adalah administrator, guru dan orang tua.

a. Peranan para administrator pendidikan

Para administrator pendidikan ini terdiri atas direktur bidang pendidikan, pusat pengembangan kurikulum, kepala kantor wilayah, kepala kantor kabupaten dan kecamatan serta kepala sekolah. Peranan para administrator di tingkat pusat (direktur dan kepala pusat) dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar serta program inti kurikulum. Kerangka dasar dan program inti tersebut akan menentukan minimum *course* yang dituntut.

Administrator tingkat pusat bekerja sama dengan para ahli pendidikan dan ahli bidang studi di Perguruan Tinggi serta meminta persetujuannya terutama dalam penyusunan kurikulum sekolah. Atas dasar kerangka dasar dan program inti tersebut para administrator daerah (kepala kantor wilayah) dan administrator lokal (kabupaten, kecamatan dan kepala sekolah) mengembangkan kurikulum sekolah bagi daerahnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Para kepala sekolah mempunyai wewenang dalam membuat operasionalisasi sistem pendidikan pada masing-masing sekolah. Para kepala sekolah ini secara terus menerus terlibat dalam pengembangan dan implementasi kurikulum, memberikan dorongan dan bimbingan kepada guru-guru. Kepala sekolah mempunyai peranan kunci dalam menciptakan kondisi untuk pengembangan kurikulum di sekolahnya. Kepemimpinan kepala sekolah sangat

mempengaruhi suasana sekolah dan pengembangan kurikulum.³⁷

Hal ini dapat disimpulkan bahwa administrator pendidikan baik dari tingkat pusat sampai tingkat satuan pendidikan dalam menjalankan tugasnya memerlukan prinsip manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan baik. Sehingga dengan begitu, seorang administrator dapat mereview dan menganalisis tentang apa saja yang perlu dikembangkan dalam kurikulum selanjutnya.

b. Peranan para ahli

Peranan para ahli pendidikan dan ahli kurikulum terutama sangat dibutuhkan dalam pengembangan kurikulum pada tingkat pusat. Apabila pengembangan kurikulum sudah pada banyak dilakukan pada tingkat daerah atau lokal, maka partisipasi mereka pada tingkat daerah, lokal bahkan sekolahjuga sangat diperlukan, sebab apa yang telah digariskan pada tingkat pusat belum tentu dapat dengan mudah dipahami oleh pengembang dan pelaksana kurikulum di daerah.³⁸

Pengembangan kurikulum memang sangat membutuhkan partisipasi para ahli bidang studi/bidang ilmu yang juga mempunyai wawasan tentang pendidikan serta perkembangan tuntutan masyarakat. Sumbangan mereka dalam memilih materi bidang ilmu, yang mutakhir dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sangat diperlukan.

c. Peranan guru

Guru memegang peranan yang cukup penting baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Dia adalah perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Sekalipun guru tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum, guru merupakan penerjemah kurikulum yang datang dari atas. Dialah yang mengolah,

³⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2011, hlm.156

³⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *ibid*, hlm.156

meramu kembali kurikulum dari pusat untuk disajikan di kelasnya.

Peranan guru bukan hanya berperan sebagai guru di dalam kelas, ia juga seorang komunikator, pendorong kegiatan belajar, pengembang alat-alat belajar, pencoba, penyusunan organisasi, manajer sistem pengajaran, pembimbing yang baik di sekolah dan masyarakat dalam hubungannya dengan pelaksanaan pendidikan seumur hidup.³⁹

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa guru sebagai pelaksana kurikulum bertugas menjalankan kegiatan belajar mengajar bagi siswanya. Berkat keahlian, keterampilan dan kemampuan seninya dalam mengajar, guru dapat membuat situasi belajar yang aktif, menggairahkan dan penuh kesungguhan dan mampu mendorong kreatifitas anak.

c. Peranan orang tua murid

Orang tua juga mempunyai peranan dalam pengembangan kurikulum. Peranan mereka dapat berkenaan dengan dua hal: pertama dalam penyusunan kurikulum dan kedua dalam melaksanakan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum mungkin tidak semua orang tua dapat ikut serta, hanya terbatas kepada beberapa orang saja yang mempunyai cukup waktu dan latar belakang yang memadai. Peranan orang tua lebih besar dalam pelaksanaan kurikulum.⁴⁰

Dalam pelaksanaan kurikulum diperlukan kerja sama antara guru atau sekolah dengan orang tua siswa. Sebagian kegiatan belajar yang dituntut kurikulum dilaksanakan di rumah, seperti pengerjaan pekerjaan rumah atau tugas yang lainnya. Orang tua juga secara berkala menerima laporan kemajuan anak-anaknya dari sekolah berupa rapor dan sebagainya.

C. Landasan- Landasan dalam Pengembangan Kurikulum

Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan atas hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Robert S. Zais (1976) mengemukakan empat landasan pokok pengembangan kurikulum, yaitu: *Philosophy and the nature of*

³⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *ibid*, hlm.157

⁴⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *ibid*, hlm.158

knowledge, society and culture, the individual, dan learnig theory. Dengan berpedoman pada empat landasan tersebut, maka perancangan dan pengembangan suatu bangunan kurikulum yaitu pengembangan tujuan (*aims, goals, objective*), pengembangan isi/materi (*content*), pengembangan proses pembelajaran (*learning activities*), dan pengembangan komponen evaluasi (*evaluation*), harus didasarkan pada landasan filosofis, psikologis, sosiologis, serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).⁴¹

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa landasan kurikulum pada satuan pendidikan sangatlah penting. Landasan kurikulum meliputi landasan filosofis, psikologis, sosiologis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan kurikulum merupakan pondasi dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, pengembangan tujuan, pengembangan isi/materi, pengembangan proses pembelajaran, dan pengembangan komponen evaluasi. Hal ini diperkuat oleh Nana Syaodih Sukmadinata, ada beberapa landasan utama dalam pengembangan suatu kurikulum, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, serta perkembangan ilmu dan teknologi.

1. Landasan Filosofis

Filsafat berupaya mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi manusia, termasuk masalah pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu terapan, tentu saja memerlukan ilmu-ilmu lain sebagai penunjang, di antaranya adalah filsafat. Filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dan pemikiran-pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Menurut Redja Mudyahardjo, terdapat tiga sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam pemikiran pendidikan pada umumnya, dan pendidikan di Indonesia pada khususnya, yaitu: filsafat Idealisme, Realisme dan filsafat Pragmatisme.

a. Landasan Filosofis Pendidikan Idealisme

Menurut filsafat idealisme bahwa kenyataan atau realitas pada hakikatnya adalah bersifat spiritual daripada bersifat fisik,

⁴¹ Dadang Sukirman, *Landasan Pengembangan Kurikulum*, Tersedia: http://file.upi.edu/Direktori/fip/jur._pend._luar_biasa/196209061986011-ahmad_mulyadiprana/pdf/landasan_kurikulum.pdf (1 Oktober 2016)

bersifat mental daripada material. Dengan demikian menurut filsafat idealisme bahwa manusia adalah makhluk spiritual, makhluk yang cerdas dan bertujuan. Pikiran manusia diberikan kemampuan rasional sehingga dapat menentukan pilihan mana yang harus diikutinya.⁴²

Berdasarkan pemikiran filsafat idealisme tersebut di atas, maka tujuan pendidikan harus dikembangkan pada upaya pembentukan karakter, pembentukan bakat insani dan kebajikan sosial sesuai dengan hakikat kemanusiaannya. Dengan demikian tujuan pendidikan dari mulai tingkat pusat (ideal) sampai pada rumusan tujuan yang lebih operasional (pembelajaran) harus merefleksikan pembentukan karakter, pengembangan bakat dan kebajikan sosial sesuai dengan fitrah kemanusiannya.

Isi kurikulum atau sumber pengetahuan dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir manusia, menyiapkan keterampilan bekerja yang dilakukan melalui program dan proses pendidikan secara praktis. Implikasi bagi para pendidik, yaitu bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terselenggaranya pendidikan. Pendidik harus memiliki keunggulan kompetitif baik dalam segi intelektual maupun moral, sehingga dapat dijadikan panutan bagi peserta didik.⁴³

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa implikasi bagi para pendidik yaitu bertanggung jawab untuk membuat suasana lingkungan yang kondusif bagi terselenggaranya pendidikan. Hal ini dapat dilakukan bagi pendidik ketika pendidik memiliki empat kompetensi pendidikan, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian.

b. Landasan Filosofis Pendidikan Realisme

Filsafat realisme boleh dikatakan kebalikan dari filsafat idealisme, dimana menurut filsafat realisme memandang bahwa dunia atau realitas adalah bersifat materi. Dunia terbentuk dari kesatuan yang nyata, substansial dan material, sementara menurut filsafat idealisme memandang bahwa realitas atau dunia

⁴² Dadang Sukirman, *ibid*

⁴³ Dadang Sukirman, *ibid*.

bersifat mental, spiritual. Menurut realisme bahwa manusia pada hakikatnya terletak pada apa yang dikerjakannya.

Mengingat segala sesuatu bersifat materi maka tujuan pendidikan hendaknya dirumuskan terutama diarahkan untuk melakukan penyesuaian diri dalam hidup dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu kurikulum kalau didasarkan pada filsafat realisme harus dikembangkan secara komprehensif meliputi pengetahuan yang bersifat sains, sosial, maupun muatan nilai-nilai. Isi kurikulum lebih efektif diorganisasikan dalam bentuk mata pelajaran karena memiliki kecenderungan berorientasi pada mata pelajaran (*subject centered*).⁴⁴

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa implikasi bagi para pendidik terutama bahwa peran pendidik diposisikan sebagai pengelola pendidikan atau pembelajaran. Untuk itu pendidik harus menguasai tugas-tugas yang terkait dengan pendidikan khususnya dengan pembelajaran, seperti penguasaan terhadap metode, media, dan strategi serta teknik pembelajaran. Secara metodologis unsur pembiasaan memiliki arti yang sangat penting dan diutamakan dalam mengimplementasikan program pendidikan atau pembelajaran filsafat realisme.

c. Landasan Filosofis Pendidikan Pragmatisme

Filsafat pragmatisme memandang bahwa kenyataan tidaklah mungkin dan tidak perlu. Kenyataan yang sebenarnya adalah kenyataan fisik, plural dan berubah (*becoming*). Manusia menurut pragmatisme adalah hasil evolusi biologis, psikologis dan sosial. Manusia lahir tanpa dibekali oleh kemampuan bahasa, keyakinan, gagasan atau norma-norma.

Nilai baik dan buruk ditentukan secara eksperimental dalam pengalaman hidup, jika hasilnya berguna maka tingkah laku tersebut dipandang baik. Oleh karena itu tujuan pendidikan tidak ada batas akhirnya, sebab pendidikan adalah pertumbuhan sepanjang hayat, proses rekonstruksi yang berlangsung secara terus menerus. Tujuan pendidikan lebih diarahkan pada upaya untuk memperoleh pengalaman yang berguna untuk memecahkan masalah baru dalam kehidupan individu maupun sosial.⁴⁵

⁴⁴ Dadang Sukirman, *ibid.*

⁴⁵ Dadang Sukirman, *ibid.*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implikasi terhadap pengembangan isi atau bahan dalam kurikulum ialah harus memuat pengalaman-pengalaman yang telah teruji, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Warisan-warisan sosial dan masa lalu tidak menjadi masalah, karena fokus pendidikan menurut paham pragmatisme adalah menyongsong kehidupan yang lebih baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Oleh karena itu proses pendidikan dan pembelajaran secara metodologis harus diarahkan pada upaya pemecahan masalah, penyelidikan dan penemuan. Peran pendidik adalah memimpin dan membimbing peserta didik untuk belajar tanpa harus terlampaui jauh mendikte para siswa.

d. Landasan Filosofis Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan Nasional di Indonesia tentu saja bersumber pada pandangan dan cara hidup manusia Indonesia, yakni Pancasila. Hal ini berarti bahwa pendidikan di Indonesia harus membawa peserta didik agar menjadi manusia yang berpancasila. Dengan kata lain, landasan dan arah yang ingin diwujudkan oleh pendidikan di Indonesia adalah yang sesuai dengan kandungan falsafah Pancasila itu sendiri.

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Pasal 2 dan 3).⁴⁶

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, rumusan tujuan tersebut merupakan keinginan luhur yang harus menjadi inspirasi dan sumber bagi para pengelola pendidikan, antara lain: guru, kepala sekolah, para pengawas pendidikan dan para pembuat

⁴⁶ Dadang Sukirman, *ibid.*

kebijakan pendidikan agar dalam merencanakan, melaksanakan, membina dan mengembangkan kurikulum didasarkan pada nilai-nilai yang dikandung dalam falsafah bangsa yaitu Pancasila dan perangkat-perangkat hukum yang ada di bawahnya seperti Undang-undang.

2. Landasan Psikologis

Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antar individu manusia, yaitu antara peserta didik dengan pendidik dan juga antara peserta didik dengan orang-orang yang lain. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya, karena kondisi psikologinya. Berkat kemampuan-kemampuan psikologis yang lebih tinggi dan kompleks inilah sesungguhnya manusia menjadi lebih maju, lebih memiliki kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan dibandingkan dengan binatang.

Kondisi psikologis setiap individu berbeda, karena perbedaan tahap perkembangannya, latar belakang sosial budayanya, juga karena perbedaan faktor-faktor yang dibawa dari kelahirannya. Peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses perkembangan. Tugas utama yang sesungguhnya dari para pendidik adalah membantu perkembangan peserta didik secara optimal dalam seluruh aspek kehidupannya. Apa yang dididiknya dan bagaimana cara mendidiknya, perlu disesuaikan dengan pola-pola perkembangan psikologi anak. Pertimbangan-pertimbangan psikologi inilah yang mendasari perumusan tujuan, memilih dan menyusun bahan ajar, memilih dan menerapkan metode pembelajaran serta teknik-teknik penilaian.⁴⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh asumsi-asumsi yang berasal dari psikologi yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik, serta bagaimana peserta didik belajar. Atas dasar itu terdapat dua cabang psikologi yang sangat penting diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar.

⁴⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Ibid*, hlm. 46

a. Perkembangan Peserta Didik dan Kurikulum

Setiap individu dalam hidupnya melalui fase-fase perkembangan. Menurut Syamsu Yusuf perkembangan individu sejak lahir sampai masa kematangan dapat digambarkan melewati fase-fase berikut⁴⁸:

Tabel 2.1

Fase-Fase Perkembangan Individu Tahap Perkembangan

Fase-Fase Perkembangan Individu Tahap Perkembangan	Usia
Masa usia prasekolah	0,0 – 6 tahun
Masa usia sekolah dasar	6,0 – 12 tahun
Masa usia sekolah menengah	12,0 -18 tahun
Masa usia mahasiswa	18,0 – 25 tahun

Setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik tersendiri, karena ada dimensi-dimensi perkembangan tertentu yang lebih dominan dibandingkan dengan tahap perkembangan lainnya. Atas dasar itu kita dapat memahami karakteristik profil pada setiap tahapan perkembangannya.

Pemahaman tentang perkembangan peserta didik sebagaimana diuraikan di atas berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum, antara lain:

- 1) Setiap peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya.
- 2) Di samping disediakan pelajaran yang sifatnya umum (program inti) yang wajib dipelajari setiap anak di sekolah, juga perlu disediakan pelajaran pilihan yang sesuai dengan minat anak.
- 3) Lembaga pendidikan hendaknya menyediakan bahan ajar baik yang bersifat kejuruan maupun akademik. Bagi anak yang berbakat di bidang akademik diberi kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya.

⁴⁸ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Remaja Rosdakarya, Bandung:, 2005, hlm 23

- 4) Kurikulum memuat tujuan-tujuan yang mengandung aspek pengetahuan, nilai/sikap, dan keterampilan yang menggambarkan pribadi yang utuh lahir dan batin.⁴⁹

Implikasi lain dari pemahaman tentang peserta didik terhadap proses pembelajaran (*actual curriculum*) dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara operasional selalu berpusat kepada perubahan tingkah laku peserta didik.
- 2) Bahan/materi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kebutuhan peserta didik sehingga hasilnya bermakna bagi mereka.
- 3) Strategi belajar mengajar yang digunakan harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak.
- 4) Media yang dipakai senantiasa dapat menarik perhatian dan minat anak.
- 5) Sistem evaluasi harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

b. Psikologi Belajar dan Pengembangan Kurikulum

Psikologi belajar erat kaitannya dengan pengembangan kurikulum. Psikologi belajar merupakan salah satu aspek yang digunakan sebagai dasar pengembangan kurikulum.

Psikologi belajar merupakan suatu studi tentang bagaimana individu belajar. Banyak sekali definisi tentang belajar. Secara sederhana, belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang terjadi melalui pengalaman. Segala perubahan tingkah laku baik yang berbentuk kognitif, afektif, maupun psikomotor dan terjadi karena proses pengalaman dapat dikategorikan sebagai perilaku belajar. Perubahan –perubahan perilaku yang terjadi karena insting atau karena kematangan serta pengaruh hal-hal yang bersifat kimiawi tidak termasuk belajar.⁵⁰

Psikologi belajar merupakan suatu studi tentang bagaimana individu belajar. Pembahasan tentang psikologi belajar erat kaitannya

⁴⁹ Masitoh, dkk. *Landasan Pengembangan Kurikulum* (Hand Out), Tersedia: http://file.upi.edu/direktori/fip/jur._pedagogik/196007071986012-ocihsetiasih/hand_ot_landasan_pengkur_revisi.pdf (06 Oktober 2016)

⁵⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2011, hlm. 52

dengan teori belajar. Pemahaman tentang teori-teori belajar berdasarkan pendekatan psikologis adalah upaya mengenali kondisi objektif terhadap individu anak yang sedang mengalami proses belajar dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaannya. Pemahaman yang luas dan komprehensif tentang berbagai teori belajar akan memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi para pengembang kurikulum baik di tingkat makro maupun tingkat mikro untuk merumuskan model kurikulum yang diharapkan.

Ada tiga jenis teori belajar yang berkembang dewasa ini dan memiliki pengaruh terhadap pengembangan kurikulum di Indonesia pada khususnya. Teori belajar tersebut adalah: (1) Teori psikologi kognitif (kognitivisme), (2) teori psikologi humanistik, dan (3) teori psikologi behavioristik.

1) Teori Psikologi Kognitif (Kognitivisme)

Teori psikologi kognitif dikenal dengan *cognitif gestalt field*. Teori belajar ini adalah teori insight. Aliran ini bersumber dari Psikologi Gestalt Field. Menurut mereka belajar adalah proses mengembangkan *insight* atau pemahaman baru atau mengubah pemahaman lama. Pemahaman terjadi apabila individu menemukan cara baru dalam menggunakan unsur-unsur yang ada di lingkungan, termasuk struktur tubuhnya sendiri. Gestalt Field melihat belajar merupakan perbuatan yang bertujuan, eksplorasi, imajinatif, dan kreatif. Pemahaman atau *insight* merupakan citra dari atau perasaan tentang pola-pola atau hubungan.⁵¹

Para ahli psikologi kognitif yang memusatkan perhatian pada perubahan dalam aspek kognisi, percaya bahwa belajar adalah suatu kegiatan mental internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Menurut teori ini cara belajar orang dewasa berbeda dengan cara belajar anak, dimana cara belajar orang dewasa lebih banyak melibatkan kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Menurut Piaget, sesuatu yang dipandang sederhana oleh orang

⁵¹ Dadang Sukirman, *op.cit*

dewasa tidak demikian sederhana ketika dipandang oleh anak-anak.

Piaget memperkenalkan empat faktor yang mendasari seseorang membuat pemahaman, yaitu:

- a) Kematangan, yaitu saatnya seseorang siap melaksanakan suatu tugas perkembangan tertentu.
- b) Aktivitas, adalah kemampuan untuk bertindak terhadap lingkungan dan belajar darinya. Pengalaman sosial, proses belajar dari orang lain atau interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita.
- c) Ekuilibrasi adalah proses terjadinya perubahan-perubahan aktual dalam berpikir.⁵²

Para ahli psikologi kognitif memandang bahwa kemampuan kognisi seseorang mengalami tahapan perkembangan. Tahap-tahap perkembangan kognitif tersebut menggambarkan kemampuan berpikir seseorang sesuai dengan usianya.

Piaget (Woolfolk, 206:33) membagi tahapan perkembangan kognitif dari usia anak sampai dewasa menjadi empat tahap sebagai berikut:

- a) Tahap sensorimotor (0-2 tahun), tingkah laku anak pada tahap ini dikendalikan oleh perasaan dan aktivitas motorik. Anak belajar melalui inderanya dan dengan cara memanipulasi benda-benda.
- b) Tahap praoperasional (2-7 tahun). Tahap ini dibagi ke dalam dua fase yaitu:
 - (1) Subtahap fungsi simbolik (2-4 tahun), adalah periode egosentris yang sesungguhnya, anak mampu mengelompokkan dengan cara yang sangat sederhana
 - (2) Subtahap fungsi intuitif (4-7 tahun), anak secara perlahan mulai berpikir dalam bentuk kelas, menggunakan konsep angka, dan melihat hubungan yang sederhana.
- c) Tahap operasi kongkrit (7-11 tahun), mampu memecahkan masalah kongkrit, mengembangkan kemampuan untuk menggunakan dan memahami secara sadar operasi logis dalam matematika, klasifikasi dan rangkaian.
- d) Tahap operasi formal (11 tahun-dewasa), mampu memahami konsep abstrak (kemampuan untuk berpikir tentang ide, memahami hubungan sebab akibat, berpikir

⁵² Dadang Sukirman, *op.cit*

tentang masa depan, dan mengembangkan serta menguji hipotesis).⁵³

Berdasarkan tahapan perkembangan kognitif yang dikemukakan Piaget di atas, dapat kita simpulkan bahwa cara berpikir anak prasekolah berbeda dengan anak usia SD, demikian pula cara berpikir anak SD berbeda dengan cara berpikir anak SLTP, SLTA. Karena itu teori perkembangan kognitif Piaget mengimplikasikan bahwa proses belajar mengajar harus memperhatikan tahap perkembangan kognisi anak. Ini berarti bahwa guru mempunyai peranan penting untuk menyesuaikan keluasan dan kedalaman program belajar, menggunakan strategi pembelajaran, memilih media dan sumber belajar dengan tingkat perkembangan kognisi anak.

Berdasarkan teori perkembangan kognitif dari Piaget, guru mempunyai peranan dalam proses belajar mengajar sebagai berikut:

- a) Merancang program, menata lingkungan yang kondusif, memilih materi pelajaran, dan mengendalikan aktivitas murid untuk melakukan inkuiri dan interaksi dengan lingkungan.
- b) Mendiagnosa tahap perkembangan murid, menyajikan permasalahan kepada murid yang sejajar dengan tingkat perkembangannya.
- c) Mendorong perkembangan murid kearah perkembangan berikutnya dengan cara memberikan latihan, bertanya dan mendorong murid untuk melakukan eksplorasi.⁵⁴

2) Teori Psikologi Behavioristik

Teori belajar behavioristik disebut juga *Stimulus-Respon Theory* (S-R). Kelompok ini mencakup tiga teori yaitu *S-R Bond*, *Conditioning*, dan *Reinforcement*. Kelompok teori ini berangkat dari asumsi bahwa anak atau individu tidak memiliki/membawa potensi apa-apa dari kelahirannya.

⁵³ Dadang Sukirman, *op.cit*

⁵⁴ Masitoh, dkk. *Landasan Pengembangan Kurikulum* (Hand Out), Tersedia: http://file.upi.edu/direktori/fip/jur._pedagogik/196007071986012-ocihsetiasih/hand_ot_landasan_pengkur_revisi.pdf (06 Oktober 2016)

Perkembangan anak ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari lingkungan.⁵⁵

Jadi, lingkunganlah yang membentuk karakter peserta didik, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat; lingkungan manusia, alam, budaya, maupun religi. Kelompok teori ini tidak mengakui sesuatu yang bersifat mental. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang dapat diamati dan menekankan pada pengaruh faktor eksternal pada diri individu.

Peranan guru dalam proses belajar mengajar berdasarkan teori psikologi behavioristik adalah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi perilaku yang dipelajari dan merumuskannya dalam rumusan yang spesifik.
 - b) Mengidentifikasi perilaku yang diharapkan dari proses belajar. Bentuk-bentuk kompetensi yang diharapkan dalam bidang studi dijabarkan secara spesifik dalam tahap-tahap kecil. Penguasaan keterampilan melalui tahap-tahap ini sebagai tujuan yang akan dicapai dalam proses belajar.
 - c) Mengidentifikasi *reinforce* yang memadai. Reinforce dapat berbentuk mata pelajaran, kegiatan belajar, perhatian dan penghargaan, dan kegiatan-kegiatan yang dipilih siswa.
 - d) Menghindarkan perilaku yang tidak diharapkan dengan jalan memperlemah pola perilaku yang dikehendaki.⁵⁶
- 3) Teori Psikologi Humanistik

Tokoh teori ini adalah Abraham H. Maslow dan Carl R. Roger. Teori ini berpandangan bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh faktor internal, dan bukan oleh faktor lingkungan. Karena itu teori ini disebut juga dengan "*self theory*". Manusia yang mencapai puncak perkembangannya adalah yang mampu mengaktualisasikan dirinya, mampu mengembangkan potensinya dan merasa dirinya itu utuh, bermakna, dan berfungsi atau *full functioning person*.⁵⁷

⁵⁵ Dadang Sukirman, *op.cit*

⁵⁶ Suyitno, Y. *Landasan Psikologis Pendidikan dalam Landasan Pendidikan*. Bandung: Sub Koordinator MKDP Landasan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, (2007), hlm 106

⁵⁷ Suyitno, Y, *Ibid*, hlm 103

Hal ini berbeda dengan teori belajar behavioristik, teori humanistik menolak proses mekanis dalam belajar, karena belajar adalah suatu proses mengembangkan pribadi secara utuh. Keberhasilan siswa dalam belajar tidak ditentukan oleh guru atau faktor-faktor eksternal lainnya, akan tetapi oleh siswa itu sendiri. Belajar melibatkan faktor intelektual dan emosional. Aliran ini percaya bahwa dorongan untuk belajar timbul dari dalam diri sendiri.

Carl R. Roger mengemukakan prinsip-prinsip belajar berdasarkan teori psikologi humanistik sebagai berikut:

- a) Manusia mempunyai dorongan untuk belajar, dorongan ingin tahu, melakukan eksplorasi dan mengasimilasi pengalaman baru.
- b) Belajar akan bermakna, apabila yang dipelajari itu relevan dengan kebutuhan anak.
- c) Belajar diperkuat dengan jalan mengurangi ancaman eksternal seperti hukuman, sikap merendahkan murid, mencemoohkan, dan sebagainya.
- d) Belajar dengan inisiatif sendiri akan melibatkan keseluruhan pribadi, baik intelektual maupun perasaan.
- e) Sikap berdiri sendiri, kreativitas dan percaya diri diperkuat dengan penilaian diri sendiri. Penilaian dari luar merupakan hal yang sekunder.⁵⁸

Bertentangan dengan teori behavioristik yang lebih menekankan partisipasi aktif guru dalam belajar, peranan guru menurut teori belajar behavioristik adalah sebagai pembimbing, sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan kepada siswa dalam belajar.

Menurut Carl R. Rogers, peran guru sebagai fasilitator dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif dan sikap positif terhadap belajar.
- b) Membantu siswa mengklasifikasikan tujuan belajar, dan guru memberikan kesempatan secara bebas kepada

⁵⁸ Suyitno, Y, *Ibid*, hlm 103

siswa untuk menyatakan apa yang hendak dan ingin mereka pelajari.

- c) Membantu siswa mengembangkan dorongan dan tujuannya sebagai kekuatan untuk belajar.
- d) Menyediakan sumber-sumber belajar, termasuk juga menyediakan dirinya sebagai sumber belajar bagi siswa.⁵⁹

Dengan demikian, guru berdasarkan psikologi humanistik harus mampu menerima siswa sebagai seorang yang memiliki potensi, minat, kebutuhan, harapan, dan mampu mengembangkan dirinya secara utuh dan bermakna. Teori ini juga memandang bahwa siswa adalah sumber belajar yang potensial bagi dirinya sendiri. Hal ini berarti teori belajar ini lebih menekankan pada partisipasi aktif siswa dalam belajar.

3. Landasan Sosial Budaya

Landasan sosial budaya mempunyai peran penting dalam mengembangkan kurikulum pendidikan pada masyarakat dan bangsa di muka bumi ini. Suatu kurikulum pada prinsipnya mencerminkan keinginan, cita-cita tertentu dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, sudah sewajarnya kalau pendidikan memperhatikan aspirasi masyarakat, dan pendidikan mesti memberi jawaban atas tekanan-tekanan yang datang dari kekuatan sosio-politik-ekonomi yang dominan.⁶⁰

Dengan demikian, para pengembang kurikulum dalam mengambil suatu keputusan mengenai kurikulum, mesti merujuk pada lingkungan di mana mereka tinggal, merespon berbagai kebutuhan yang dilontarkan atau diusulkan oleh beragam golongan atau kelompok dalam masyarakat. Beberapa aspek-aspek yang turut memberikan pengaruh mengenai apa yang harus dimasukkan ke dalam kurikulum antara lain:

- a. Interaksi yang kompleks antara kekuatan-kekuatan sosial, politik, ekonomi, industri, dan kultural dengan masyarakat.
- b. Berbagai kekuatan dominan, yang erat hubungannya dengan negara yang bersangkutan.

⁵⁹ Suyitno, *Ibid*, hlm 104

⁶⁰ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, Ar Ruzz Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 96

- c. Pribadi pimpinan dan tokoh-tokoh yang memegang kekuasaan formal dan informal di berbagai lapisan masyarakat.⁶¹

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka para pengembang kurikulum di madrasah/sekolah memiliki tugas untuk:

- a. Mempelajari dan memahami kebutuhan masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, peraturan, keputusan pemerintah dan lain-lain.
- b. Menganalisis masyarakat di mana sekolah berada
- c. Menganalisis syarat dan tuntutan terhadap tenaga kerja
- d. Menginterpretasi kebutuhan individu dalam ruang lingkup kepentingan masyarakat.⁶²

Menurut Daud Yusuf (1982), terdapat tiga sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan, yaitu: logika, estetika, dan etika. Logika adalah aspek pengetahuan dan penalaran, estetika berkaitan dengan aspek emosi atau perasaan, dan etika berkaitan dengan aspek nilai. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika (pikiran). Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi.

Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup ini sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam konteks inilah kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Untuk dapat menjawab tuntutan tersebut bukan hanya pemenuhan dari segi isi kurikulumnya saja, melainkan juga dari segi pendekatan dan strategi pelaksanaannya. Oleh karena itu guru sebagai pembina dan pelaksana kurikulum dituntut lebih peka mengantisipasi perkembangan masyarakat, agar apa yang diberikan kepada siswa relevan dan berguna bagi kehidupan siswa di masyarakat.

⁶¹ Abdullah Idi, *Ibid*, hlm. 97

⁶² Abdullah Idi, *Ibid*, hlm. 97-98

Penerapan teori, prinsip, hukum, dan konsep-konsep yang terdapat dalam semua ilmu pengetahuan yang ada dalam kurikulum, harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sehingga hasil belajar yang dicapai oleh siswa lebih bermakna dalam hidupnya. Pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan masyarakat. Tyler (1946), Taba (1963), Tanner dan Tanner (1984) menyatakan bahwa tuntutan masyarakat adalah salah satu dasar dalam pengembangan kurikulum. Calhoun, Light, dan Keller (1997) memaparkan tujuh fungsi sosial pendidikan, yaitu:

- a. Mengajar keterampilan.
- b. Mentransmisikan budaya.
- c. Mendorong adaptasi lingkungan.
- d. Membentuk kedisiplinan.
- e. Mendorong bekerja berkelompok.
- f. Meningkatkan perilaku etik, dan
- g. Memilih bakat dan memberi penghargaan prestasi.⁶³

Perubahan sosial budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung akan mengubah kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat itu sendiri. Masyarakat kota berbeda dengan masyarakat desa, masyarakat tradisional berbeda dengan masyarakat modern.

Adanya perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya sebagian besar disebabkan oleh kualitas individu-individu yang menjadi anggota masyarakat tersebut. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat pada umumnya juga berpengaruh terhadap individu-individu sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu pengembangan kurikulum yang hanya berdasarkan pada keterampilan dasar saja tidak akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang bersifat teknologis dan mengglobal. Akan tetapi pengembangan kurikulum juga harus ditekankan pada pengembangan individu dan keterkaitannya dengan lingkungan sosial setempat.

⁶³ Masitoh, dkk. *op.cit.*

Berdasarkan uraian di atas, sangatlah penting memperhatikan faktor karakteristik masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Salah satu ciri masyarakat adalah selalu berkembang. Perkembangan masyarakat dipengaruhi oleh falsafah hidup, nilai-nilai, IPTEK, dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat menuntut tersedianya proses pendidikan yang relevan. Untuk terciptanya proses pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat diperlukan kurikulum yang landasan pengembangannya memperhatikan faktor perkembangan masyarakat.

4. Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sejak abad pertengahan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Masa setelah abad pertengahan sering disebut zaman modern. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini banyak didasari oleh penemuan dan hasil pemikiran para filsuf purba seperti Thales, Phythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles, Archimides, yang hidup sebelum Masehi, sampai kepada Al-Khawarizmi yang hidup pada abad ke-9. Perkembangan ilmu pengetahuan modern tidak dapat dilepaskan dari peranan ilmuan muslim.⁶⁴

Selama beberapa abad, sampai dengan abad ke-13, pengembangan ilmu pengetahuan didominasi oleh ilmuan muslim. Dalam bidang geografi dikenal nama Al-Kindi sampai dengan Musa Al-Khawarizmi dan Al-Beruni sebagai penemu geodesi. Ilmu Pengetahuan Alam dikembangkan oleh Al-Beruni, Al-Kindi, Ibn Bajjah Al-Bagdadi adalah ahli botani terkenal. Dalam bidang matematika dikenal Jamshid Al-Kashmi, Al-Khawarizmi dan Omar Khayyam. Dalam bidang kedokteran dikenal Ibn Sina dan Al-Razi.⁶⁵

Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut berpengaruh cukup luas terhadap kehidupan masyarakat dan dunia pendidikan. Ada beberapa bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai pengaruh sangat besar, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat, misalnya bidang informasi, komunikasi, transportasi, dan industri.

⁶⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *op.cit.* hlm. 65

⁶⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *op.cit.* hlm 65-66

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa beberapa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Semua urusan manusia menjadi serba cepat, tepat, efektif, efisien dan mobilitas masyarakat menjadi tinggi. Di samping itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menimbulkan banyak perubahan dalam tata nilai, baik nilai sosial, budaya, spiritual, intelektual, maupun material. Demikian juga menimbulkan kebutuhan baru, aspirasi baru, sikap hidup baru.⁶⁶

Hal-hal tersebut di atas menuntut perubahan pada sistem dan isi pendidikan. Pendidikan bukan hanya mewariskan nilai-nilai dan hasil kebudayaan lama, tetapi juga mempersiapkan generasi muda agar mampu hidup pada masa kini dan yang akan datang.

Seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, dewasa ini banyak dihasilkan temuan-temuan baru dalam berbagai bidang kehidupan manusia seperti kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan kehidupan lainnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) bukan menjadi monopoli suatu bangsa atau kelompok tertentu. Baik secara langsung maupun tidak langsung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut berpengaruh pula terhadap pendidikan. Perkembangan teknologi industri mempunyai hubungan timbal-balik dengan pendidikan. Industri dengan teknologi maju memproduksi berbagai macam alat-alat dan bahan yang secara langsung atau tidak langsung dibutuhkan dalam pendidikan dan sekaligus menuntut sumber daya manusia yang handal untuk mengaplikasikannya.

Kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat hasil industri seperti televisi, radio, video, komputer, dan peralatan lainnya. Penggunaan alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan, apalagi disaat perkembangan produk teknologi komunikasi yang semakin canggih, menuntut pengetahuan dan keterampilan serta kecakapan yang memadai dari para guru dan pelaksana program pendidikan lainnya. Mengingat pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa depan

⁶⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *op-cit*, hlm 78

dan perubahan masyarakat yang semakin pesat termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengembangan kurikulum haruslah berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. Efektivitas Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum terbukti efektif ketika tujuan pendidikan tercapai. Ketercapaian tujuan pendidikan di MTs Darul Falah ini dapat dilihat pada 1) peserta didik telah mencapai atau bahkan melampaui kriteria ketuntasan minimal (KKM), 2) memenuhi kriteria kenaikan kelas, 3) peserta didik telah mencapai atau bahkan melampaui standar nilai kelulusan ujian nasional, ujian akhir madrasah berstandar nasional dan ujian madrasah. Ketiga standar kriteria tersebut, dapat dilihat pada salinan surat keputusan Kepala Madrasah pada lampiran tesis ini.

Indikator efektivitas pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menuju Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut :

1. Rekapitulasi nilai rata-rata siswa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam meliputi Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, SKI dan Bahasa Arab pada Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Madrasah (UM), dan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) melampaui kriteria ketuntasan minimal (KKM) dan Standar Nilai Kelulusan (SNK).
2. Rekapitulasi ketuntasan belajar siswa pada Ujian Akhir Semester mencapai minimal 85%.

E. Kajian Terdahulu

Pada dasarnya telah banyak dijumpai tulisan baik dalam bentuk tesis, skripsi maupun jurnal yang membahas tentang pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, akan tetapi masing-masing memiliki spesifikasi dan sudut pandang pembahasan yang berbeda antara lain sebagai berikut :

Pertama: Tesis saudara Kholil (IAIN Walisongo Semarang, 2010) yang berjudul : “Kontribusi Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

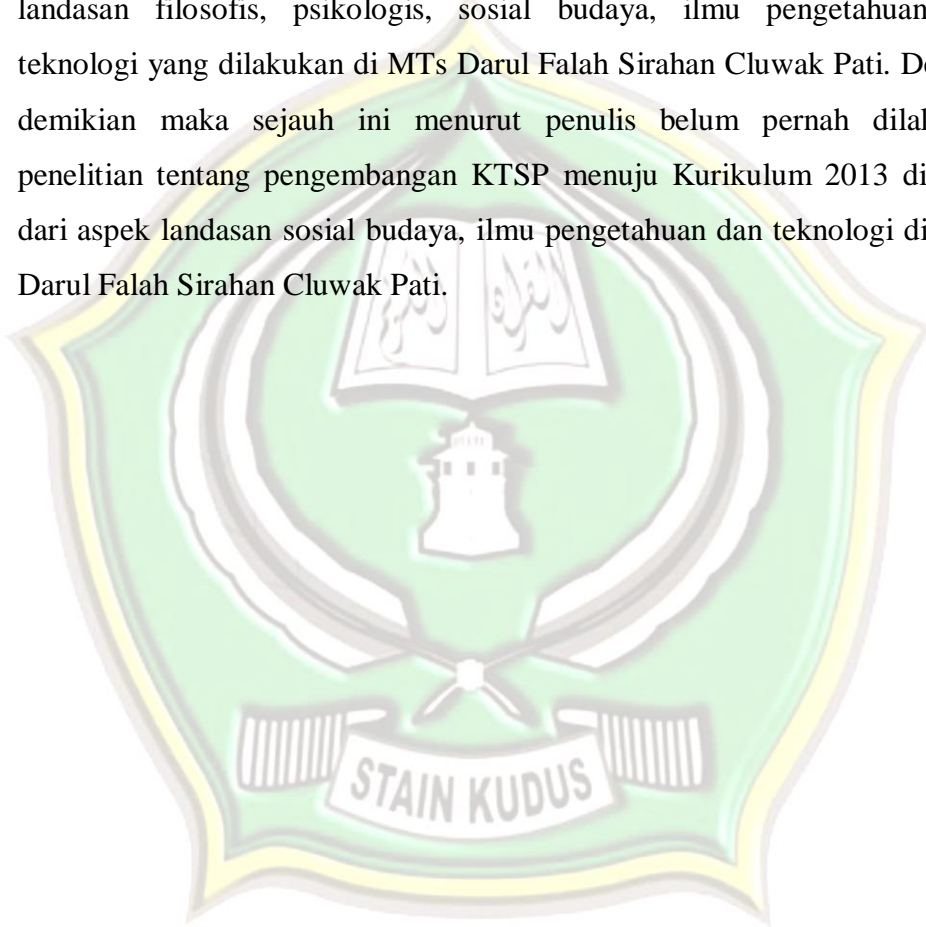
Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di Kabupaten Demak” Dalam tesisnya secara garis besar dijelaskan bahwa Pengawas PAI mempunyai peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengawasan akademik dan pengawasan administratif termasuk di dalamnya adalah pengembangan KTSP Madrasah Ibtidaiyah. Pengembangan KTSP Madrasah Ibtidaiyah dalam kenyataan di lapangan tidak bisa berjalan dengan maksimal tanpa adanya pengawasan dari supervisor atau pengawas. Maka Pengawas PAI diharapkan selalu meningkatkan kinerja dan kompetensinya.

Kedua: Tesis Saudara Muhammad Ali (Universitas Pendidikan Indonesia, 2009). Studi Tentang Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Mata Pelajaran A-Qur'an Hadits (Penelitian Kualitatif Pada MTs Negeri 1 dan 2 di Kota Bandung. Dalam tesis ini secara garis besar menekankan pembahasannya tentang pengembangan KTSP khususnya pada mata pelajaran Al Qur'an Hadits jenjang Madrasah Tsanawiyah di MTs Negeri 1 dan 2 di Kota Bandung. Tesis tersebut bertujuan untuk mengetahui implikasi KTSP mata pelajaran Al Qur'an Hadits terhadap kompetensi peserta didik.

Ketiga: Tesis Saudara Abdul Rozak Sidik (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013). Pengembangan Kurikulum Sekolah *Full Day* (Studi Situs di SDIT Al Muhajirin Sawangan Magelang). Dalam tesis ini secara garis besar menekankan pembahasannya tentang pengembangan dokumen KTSP, Prota, Promes, Silabus dan RPP dengan mengacu pada standar mutu yang dirumuskan oleh JSIT.

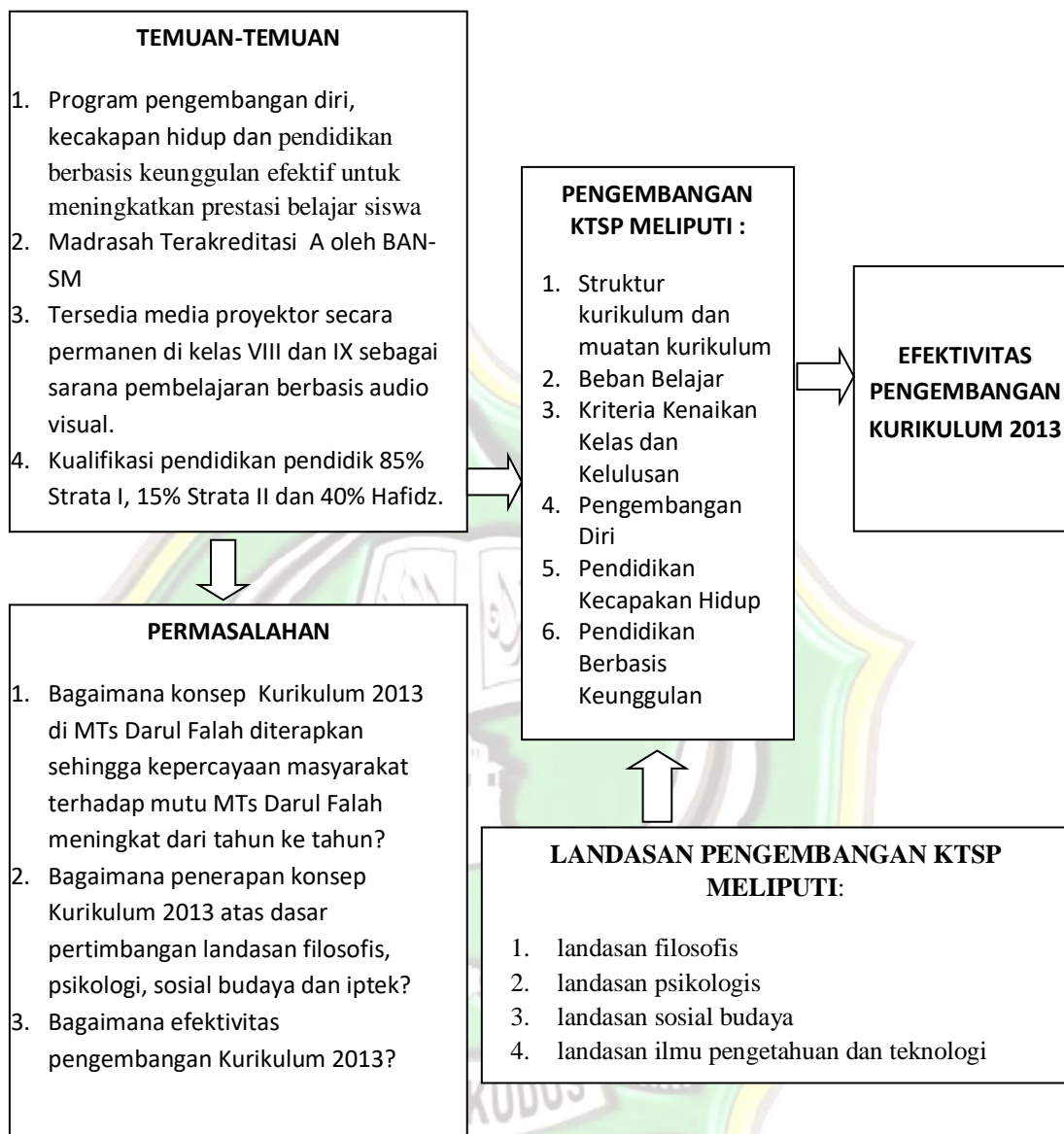
Keempat : Tesis Syamsul Arifin (UNWAHAS Semarang, 2012) yang berjudul “ Upaya Guru Dalam Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Kegiatan Belajar Mengajar dan Pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di MTs Teladan Al Amiriyah Kambangan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal“ Dalam tesisnya tersebut dibahas tentang pengaruh pelaksanaan KTSP dan kegiatan belajar mengajar terhadap pencapaian kriteria ketuntasan minimal hasil belajar siswa .

Berdasarkan pada beberapa penelitian yang telah penulis paparkan diatas terdapat persamaan dan perbedaan masalah yang dibahas. Adapun persamaannya adalah pembahasan tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di madrasah/sekolah, dan perbedaannya adalah secara garis besar dari seluruh penelitian diatas membahas tentang implementasi KTSP di madrasah/sekolah. Sedangkan penelitian tesis ini membahas tentang pengembangan KTSP menuju Kurikulum 2013 ditinjau dari aspek landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan di MTs Darul Falah Sirahan Cluwak Pati. Dengan demikian maka sejauh ini menurut penulis belum pernah dilakukan penelitian tentang pengembangan KTSP menuju Kurikulum 2013 ditinjau dari aspek landasan sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi di MTs Darul Falah Sirahan Cluwak Pati.



+

F. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1. Proses Pengembangan Kurikulum Ditinjau dari Landasan Filosofis, Psikologis, Sosial Budaya dan Iptek